

**IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA EKONOMI
PRODUKTIF PADA WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI
SEBAGAI UPAYA PENANGANAN TERHADAP PEMERLU
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA**

**UNIVERSITAS ANDALAS
PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik*

Oleh:

Fitria Hilmi

BP : 2010832017



Pembimbing:

Dr. Aidinil Zetra, MA

Andhik Beni Saputra, S.IP.,MA

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2024

ABSTRAK

Wanita rawan sosial ekonomi merupakan wanita berusia 18-59 tahun yang belum menikah atau janda dan tidak memiliki penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah memiliki program usaha ekonomi produktif merupakan salah satu upaya penanganan terhadap para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang sudah menjadi program prioritas pemerintah. Salah satu dari golongan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial adalah wanita rawan sosial ekonomi. Wanita rawan sosial ekonomi merupakan golongan PPKS terbanyak kedua setelah fakir miskin Di Kota Payakumbuh. Melihat angka kemiskinan yang terus menurun di Kota Payakumbuh tetapi tidak dibarengi dengan turunnya angka wanita rawan sosial ekonomi maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi program usaha ekonomi produktif pada wanita rawan sosial ekonomi sebagai upaya penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di kota payakumbuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, serta memanfaatkan teori Edward III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil temuan penelitian bahwa implementasi program usaha ekonomi produktif pada wanita rawan sosial ekonomi sebagai upaya penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di kota payakumbuh sudah berjalan cukup baik, tetapi memang terdapat kurang di beberapa aspek. hal tersebut dibuktikan dengan. Pertama adanya komunikasi yang dibangun antara Dinas Sosial Kota Payakumbuh bersama dengan tim pendamping cukup baik tetapi antara pendamping dan wanita rawan sosial ekonomi terdapat kekurangan karena ada beberapa wanita rawan sosial ekonomi yang tidak mendapatkan pendampingan setelah pemberian bantuan. Kedua, sumber daya manusia yang tersedia merupakan orang-orang berpengalaman dibidangnya masing-masing, tetapi masih terdapat kurangnya sumber daya manusia sebagai pendamping program. Ketiga, implementor memiliki tanggung jawab dan komitmen yang kuat. Keempat struktur birokrasi yang ada dimulai dari tingkat tertinggi hingga terendah. Hal tersebut untuk memastikan bahwa setiap lembaga memiliki tanggung jawab dan wewenang khusus dalam melaksanakan tugasnya.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Wanita rawan sosial ekonomi, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial



ABSTRACT

Socio-economically vulnerable women are women aged 18-59 years who are unmarried or widowed and do not have enough income to meet their daily needs. The government has a productive economic enterprise program which is one of the efforts to deal with the need for social welfare services which has become a government priority program. One of the groups of social welfare service providers is socio-economically vulnerable women. Socio-economically vulnerable women are the second largest group of PPKS after the poor in Payakumbuh City. Seeing that the poverty rate continues to decline in Payakumbuh City but is not accompanied by a decrease in the number of socio-economically vulnerable women, this study aims to explain and analyze the implementation of productive economic business programs for socio-economically vulnerable women as an effort to deal with the need for social welfare services in Payakumbuh City. This research uses a qualitative approach with a case study method, and utilizes Edward III's theory which includes four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the research findings that the implementation of the productive economic business program for socio-economically vulnerable women as an effort to deal with the need for social welfare services in Payakumbuh city has been running quite well, but there is indeed a lack in several aspects. this is evidenced by. First, the communication built between the Payakumbuh City Social Service together with the assistance team is quite good but between the assistants and socio-economically vulnerable women there are shortcomings because there are several socio-economically vulnerable women who do not get assistance after providing assistance. Second, the available human resources are experienced people in their respective fields, but there is still a lack of human resources as program assistants. Third, implementers have strong responsibilities and commitments. Fourth, the existing bureaucratic structure starts from the highest to the lowest level. This is to ensure that each institution has specific responsibilities and authority in carrying out its duties.

Keywords: Policy implementation, Socio-economically vulnerable women, Social Welfare Services Government.

